



**IDENTIFIKASI PENGAMBILAN TITIK KOORDINAT  
AREAL YANG BERPOTENSI RAWAN LONGSOR DI  
JALAN SOEKARNO-HATTA KOTA BONTANG**

Oleh:

**ALFI HARY NUGROHO, S.T.**

**NDH: 04**

**PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL GOLONGAN III ANGKATAN VI**

**PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN  
DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
SAMARINDA**

**2019**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan karunia, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga laporan hasil aktualisasi dengan judul “**IDENTIFIKASI PENGAMBILAN TITIK KOORDINAT AREAL YANG BERPOTENSI RAWAN LONGSOR DI JALAN SOEKARNO-HATTA KOTA BONTANG**” dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Laporan rancangan aktualisasi ini dibuat sebagai salah satu penerapan nilai-nilai dasar ASN yang dilaksanakan di unit kerja. Laporan rancangan aktualisasi ini merupakan salah satu syarat kelulusan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III angkatan VI dengan pola baru yang dilaksanakan di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (PUSLATBANG KDOD LAN) di Samarinda tahun 2019.

Berkaitan dengan diselesaikannya laporan hasil aktualisasi ini, dengan penuh kerendahan hati saya sampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Mariman Darto, M.Si. selaku kepala PUSLATBANG KDOD LAN Samarinda;
2. Bapak Ir.Aziz Muslimin selaku mentor;
3. Bapak Bina Antasariansyah selaku kepala bidang Binamarga di Bontang;
4. Bapak Hadi Nugraha,ST., selaku Kasi pengendalian dan pemanfaatan kebinamargaan di Bontang;
5. Bapak Fani Heru Wismono, SE., MA. selaku *coach*;
6. Seluruh pegawai yang ada di lingkungan PUSLATBANG KDOD LAN Samarinda khususnya para widyaiswara;
7. Seluruh pegawai yang ada di lingkungan DPUPR kota Bontang khususnya dibidang Binamarga
8. Seluruh teman-teman angkatan IV Pelatihan Dasar CPNS Golongan III tahun 2019. Semoga laporan hasil aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Samarinda, 25 November 2019

Penulis



## LEMBAR PERSETUJUAN RANCANGAN AKTUALISASI

Yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa Hasil Aktualisasi Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Angkatan VI:

Nama : Alfi Hary Nugroho, S.T.  
NDH : 04  
NIP : 19910517 201903 1 014  
Jabatan : Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan Beton  
Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota  
Judul Aktualisasi : Identifikasi Pengambilan Titik Koordinat Areal  
Yang Berpotensi Rawan Longsor di Jalan Soekarno-  
Hatta Kota Bontang

Dinyatakan LAYAK untuk diajukan dalam Seminar Hasil Aktualisasi.

Samarinda, 25 November 2019

Mentor,

Coach,

Ir. Abdul Aziz Muslimin

NIP. 19660410 200112 1 002

Fani Heru Wismono, SE., MA.,

NIP. 19811008 200804 1 001



## LEMBAR PENGESAHAN RANCANGAN AKTUALISASI

Yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa Hasil Aktualisasi Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Angkatan VI:

Nama : Alfi Hary Nugroho, S.T.  
NDH : 04  
NIP : 19910517 201903 1 014  
Jabatan : Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan Beton  
Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota  
Judul Aktualisasi : Identifikasi Pengambilan Titik Koordinat Areal Yang Berpotensi Rawan Longsor di Jalan Soekarno-Hatta Kota Bontang

TELAH DISEMINARKAN dalam Seminar Hasil Aktualisasi.

Samarinda, 26 Oktober 2019

Penguji,

Coach,

Rokip Purnomo, SE.,

NIP. 19740430 200804 1 001

Fani Heru Wismono, SE., MA.,

NIP. 19811008 200804 1 001

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Aktualisasi .....	3
1.3 Ruang Lingkup .....	4
BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	5
2.1 Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota ... ..	5
2.2 Tugas dan Fungsi.....	5
2.3 Visi dan Misi .....	5
2.4 Struktur Organisasi .....	6
2.5 Sasaran Kinerja Pegawai .....	8
BAB III LANDASAN TEORI .....	9
3.1 Konsep Nilai Dasar ANEKA .....	9
A. Akuntabilitas .....	9
B. Nasionalisme .....	11
C. Etika Publik .....	12
D. Komitmen Mutu .....	14
E. Anti Korupsi .....	15
3.2 Kedudukan dan Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) .....	16
A. Manajemen ASN .....	16
B. <i>Whole Of Government</i> (WoG) .....	18

C. Pelayanan Publik .....	19
<b>BAB IV RANCANGAN AKTUALISASI .....</b>	<b>21</b>
4.1 Identifikasi Isu .....	21
4.2 Prioritas (Teknik Analisis) .....	22
4.3 Isu Terpilih .....	23
4.4 Uraian Kegiatan .....	24
4.5 Rancangan Aktualisasi .....	26
4.6 Jadwal Kegiatan .....	30
<b>BAB V <i>Role Model</i> .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB VI PELAKSANAAN AKTUALISASI .....</b>	<b>32</b>
6.1 Laporan Kegiatan Aktualisasi Nilai – Nilai Dasar .....	32
A. Kegiatan 1 .....	32
B. Kegiatan 2 .....	34
C. Kegiatan 3 .....	37
D. Kegiatan 4 .....	39
<b>BAB VII KENDALA DAN SOLUSI .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>41</b>
8.1 Kesimpulan .....	41
8.2 Saran .....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas PUPR .....	7
Gambar 2. Foto Dokumentasi Pekerjaan di Lapangan .....	21

## DAFTAR TABEL

Tabel. Proses Penentuan Skala Prioritas Isu Menggunakan Metode USG .....	23
Tabel 2. Rancangan Aktualisasi .....	26
Tabel 3. Jadwal Kegiatan .....	30

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) nomor 5 tahun 2014 dijelaskan definisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Kedudukan dan peranan ASN dalam setiap organisasi pemerintah sangatlah menentukan, dikarenakan ASN memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok ASN yang mampu memberikan peranan tersebut adalah ASN yang memiliki kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan loyalitas kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa instansi pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan terintegrasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Tujuan dari pendidikan dan pelatihan terintegrasi adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang, khususnya dalam mendukung reformasi birokrasi pada setiap ASN. Pembekalan latsar bagi para Calon Pegawai Negeri Sipil melalui internalisasi nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi) merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas serta mutu aparatur sipil negara. Pada akhirnya calon aparatur sipil negara yang terbentuk dari pelatihan dasar ialah mereka yang mampu bekerja secara profesional dan menguasai kompetensi teknis, manajerial, serta sosial kultural untuk kemudian mendukung peran dan fungsi aparatur sipil negara sebagai pelayan utama publik.

Kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru atau berinovasi juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung produktifitas kerja aparatur sipil negara, karena seperti yang kita ketahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangatlah pesat. Salah satu kegiatan nyata dari bentuk penerapan nilai-nilai dasar ANEKA melalui kegiatan aktualisasi yang harus dikerjakan di instansi masing-masing. Melalui kegiatan aktualisasi ini, setiap aparatur sipil negara diharapkan dapat membangun gagasan kreatif, menjabarkan tahapan kegiatan yang dilakukan, serta mempresentasikan hasil dari kegiatan yang dilakukan di unit masing-masing, sehingga pada akhirnya mampu memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi lingkungan kerja. Dengan adanya pola baru dalam penerapan nilai-nilai ANEKA ditambah dengan nilai Manajemen ASN, *Whole of Government* (WoG), dan Pelayanan Publik, maka setiap CPNS yang mengikuti latsar wajib menghabituisikan nilai-nilai yang sudah diberikan pada saat latsar. Habituisasi yang dilakukan di masing-masing instansi bertujuan untuk membiasakan ASN melakukan proses aktualisasi diri terhadap berbagai materi yang diterima saat proses latsar.

*Whole of Government* WoG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sector dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Dan Kota Bontang telah mencoba menerapkan WoG dengan membangun gedung pemerintahan terpusat yang terdiri dari dinas-dinas tempat ASN berkantor dan gedung walikota yaitu di daerah kecamatan Bontang Selatan kelurahan Bontang Lestari.

Bontang Lestari sebagai lokasi yang terpilih pembangunan gedung pemerintahan terpusat dan untuk menuju lokasi tersebut harus melalui jalan soekarno-hatta yang mempunyai panjang jalan sekitar 15 Kilometer. Daerah Bontang Lestari mempunyai kondisi kontur yang berbukit sehingga jalan soekarno-hatta dibangun di punggung bukit untuk menghindari jalan menjadi

banjir ketika hujan lebat. Tetapi dengan membangun jalan di punggung bukit tidak terlepas dari masalah, yaitu terjadi longsor.

Gerakan tanah adalah perpindahan massa tanah atau batu pada arah tegak, mendatar atau miring dari kedudukan semula, gerakan tanah mencakup gerak rayapan dan aliran maupun longsor. Dari definisi gerakan tanah bisa disimpulkan bahwa longsor adalah bagian dari gerakan tanah. (Widjojo, 1985). Pada prinsipnya tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah batuan.

Oleh karena itu jalan soekarno-hatta sebagai akses para ASN menuju gedung pemerintahan terpusat merupakan jalan yang menjadi perhatian penting agar pemanfaatan jalan tetap selalu dalam kondisi yang baik untuk dilalui pengguna jalan. Terputusnya akses jalan ketika terjadi longsor akan berdampak besar terhadap kinerja ASN, sehingga pengendalian jalan perlu dilakukan agar penanganan dini dan pencegahan pada kerusakan jalan dapat teratasi.

Dalam pelaksanaannya penerapan pengendalian jalan terhadap longsor jalan soekarno-hatta di kota Bontang masih belum ada. Oleh sebab itu, Salah satu cara pengendalian jalan terhadap longsor pada jalan adalah dengan melakukan identifikasi pada areal jalan yang berpotensi rawan terjadinya longsor. Hal tersebut dimaksudkan dalam upaya menjaga kualitas kondisi jalan yang tetap baik.

## **1.2 Tujuan Aktualisasi**

Tujuan daripada kegiatan aktualisasi ini adalah agar CPNS mampu menyusun kerangka aktualisasi berdasarkan atas pemahaman kedudukan dan peran profesi ASN dalam NKRI (manajemen ASN, *Whole of Government*, dan pelayanan publik) yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar ASN (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi). Selain itu tujuan

dari kegiatan aktualisasi ini juga diharapkan CPNS mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan isu atau permasalahan di masing-masing instansi.

### **1.3 Ruang Lingkup**

Kegiatan aktualisasi ini didasari oleh nilai-nilai dasar ASN (ANEKA), kedudukan dan peran ASN dalam pelaksanaan tugas dan jabatan sehari-hari. Kegiatan yang dilakukan meliputi pelaksanaan rancangan aktualisasi yang telah dibuat, menyiapkan bukti dan dokumentasi pelaksanaan aktualisasi, bimbingan pembuatan laporan aktualisasi dengan *coach* dan mentor masing-masing, hingga akhirnya menyusun dan membuat laporan aktualisasi untuk menjadi bahan seminar di akhir kegiatan Pelatihan Dasar CPNS. Batas waktu yang telah ditentukan untuk pelaksanaan aktualisasi ini adalah selama *off campus* yaitu 30 hari setelah peserta CPNS kembali ke instansinya masing-masing.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

#### **2.1 Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah, Peraturan Walikota Bontang Nomor 36 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Berkedudukan di Jalan Bessai Berinta, Gedung Graha Taman Praja Blok 4 lantai dasar, Kota Bontang.

#### **2.2 Tugas dan Fungsi**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan Administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.3 Visi dan Misi**

**Visi** adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang. Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kota Bontang Tahun “*Menguatkan Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri yang*

*bertumpu pada kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat”.*

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kota Bontang tersebut diatas dilaksanakan **Misi** sebagai berikut:

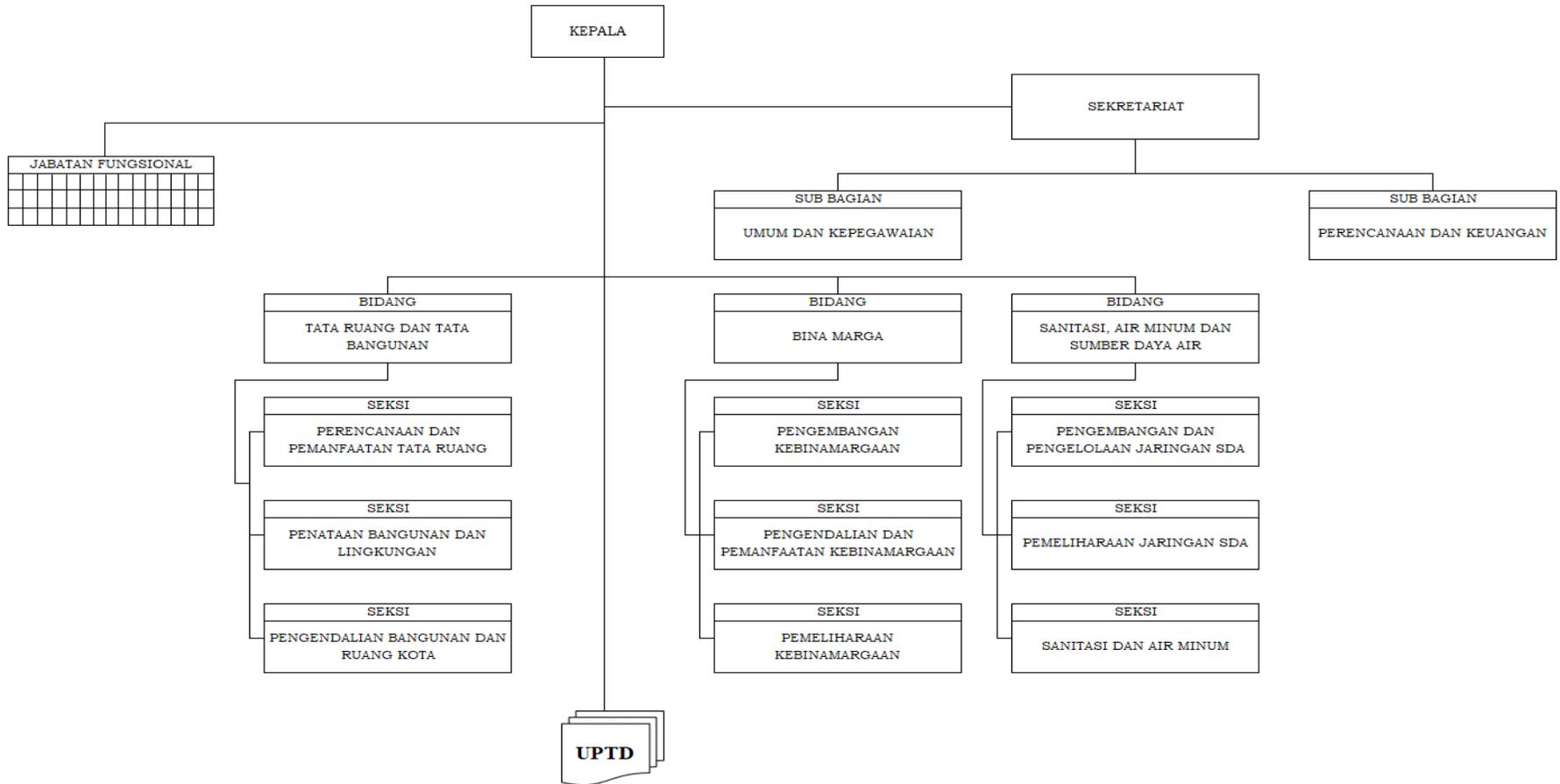
- a. Menjadikan kota Bontang sebagai *Smart City* melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- b. Menjadikan kota Bontang sebagai *Green City* melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- c. Menjadikan kota Bontang sebagai *Creative City* melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim.

## **2.4 Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, dengan membawahi 2 sub bagian :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan membawahi 3 seksi :
  - a. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang
  - b. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
  - c. Seksi Pengendalian Bangunan dan Ruang Kota
4. Bidang Bina Marga, membawahi 3 seksi :
  - a. Seksi Pengembangan Kebinamargaan
  - b. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Kebinamargaan
  - c. Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan
5. Bidang Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air, membawahi 3 seksi:
  - a. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan SDA
  - b. Seksi Pemeliharaan Jaringan SDA
  - c. Seksi Sanitasi dan Air Minum

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA**



*Gambar 1. Strktur Organisasi Dinas PUPR*

## **2.5 Sasaran Kinerja Pegawai**

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk jabatan Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan Beton adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan program pengendalian kebinamargaan
2. Membantu melakukan survey lapangan atas evaluasi dan/atau monitoring kegiatan
3. Melaksanakan fungsi bidang pengawasan kebinamargaan
4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengendalian dan pemanfaatan kebinamargaan
5. Tugas Lain yang Diberikan Atasaan:
  - a. Mengikuti Rapat Pra Lelang
  - b. Mengikuti Rapat Penjelasan Saat Lelang
  - c. Mengikuti Rapat Kedinasan Lainnya.

## **BAB III**

### **LANDASAN TEORI**

#### **3.1 Konsep Nilai Dasar ANEKA**

##### **A. Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai (Rohmat, 2017). Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik.

- Nilai-nilai publik tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
  1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sector, kelompok, pribadi;
  2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis;
  3. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik;
  4. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan.
- Aspek-aspek akuntabilitas meliputi:
  1. Merupakan sebuah hubungan: hubungan dua pihak antara individu/kelompok/institusi dengan negara dan masyarakat;
  2. Berorientasi pada hasil: Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif;
  3. Membutuhkan adanya laporan: Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas;
  4. Memerlukan konsekuensi: konsekuensi dapat berupa penghargaan atau sanksi;
  5. Memperbaiki kinerja: tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat.

- Akuntabilitas publik memiliki fungsi utama (Bovens, 2007), yaitu:
  1. Menyediakan kontrol demokratis (peran demokratis);
  2. Mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional);
  3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar).

Akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal dan horizontal.

- Terdapat beberapa tingkatan dalam akuntabilitas, yakni:
  1. Akuntabilitas personal: mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral dan etika;
  2. Akuntabilitas individu: mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan;
  3. Akuntabilitas kelompok: mengacu pada hubungan antara berbagai kelompok dalam satu institusi;
  4. Akuntabilitas organisasi: mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi/institusi maupun kinerja organisasi kepada *stakeholders* lainnya.;
  5. Akuntabilitas stakeholder: tanggungjawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif dan bermartabat.
- Nilai-nilai dasar akuntabilitas antara lain:
  1. Kesesuaian;
  2. Dapat dipertanggungjawabkan;
  3. Terkontrol;
  4. Integritas;
  5. Relevan;
  6. Informatif; dan
  7. Transparan.

Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung 4 (empat) dimensi yaitu

akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan Akuntabilitas kebijakan. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu: kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab (responsibilitas), keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi.

## **B. Nasionalisme**

Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, ber peradaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.

Nasionalisme/cinta tanah air merupakan bentuk kesadaran diri terhadap cita-cita / tujuan sebagai pendorong untuk membangun diri dalam memberikan kontribusi yang nyata demi kemajuan bangsa. Nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara sekaligus menghormati bangsa lainnya.

Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan; menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri; mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa; menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia; serta mengembangkan sikap tenggang rasa.

Nasionalisme berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara, setiap aparatur sipil negara harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi pemersatu bangsa mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia, dan menjaga

keutuhan NKRI. Nasionalisme berperan dalam pembinaan karakter bangsa, pengawal pembangunan nasional (*nation building*), dan penguat integrasi nasional. Terdapat lima indikator dari nilai-nilai dasar nasionalisme yang harus diperhatikan oleh aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya yaitu Pancasila: 1. ketuhanan yang Maha Esa, 2. kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. persatuan Indonesia, 4. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Latief dkk., 2015).

### **C. Etika Publik**

Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik/buruk dan benar/salah suatu perilaku, tindakan, dan keputusan yang mengarahkan kebijakan publik dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik (Haryatmoko, 2011).

- Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yaitu:
  1. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan;
  2. Sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi;
  3. Modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual.
- Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN yaitu:
  1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila;
  2. Setiadan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
  3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
  4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
  5. Menciptakan lingkungan kerja yang tidak diskriminatif;
  6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur;
  7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
  8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
  9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat,

- akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
  11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama;
  12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
  13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
  14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.
- Berdasarkan Undang-undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yaitu:
1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
  2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
  3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
  4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
  6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara;
  7. Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
  8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
  9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
  10. Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
  11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
  12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN (Kumorotomo dkk., 2015).

#### **D. Komitmen Mutu**

Mutu didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan terhadap kemampuan suatu organisasi dalam menjawab kebutuhan dan harapan pelanggan. Mutu bersifat dinamis, sehingga setiap organisasi dituntut untuk memperbaiki kinerjanya secara terus-menerus. Untuk menghasilkan mutu dalam pelayanan publik yang bersifat jasa, sangat membutuhkan kerjasama dan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, aparatur sipil negara harus mampu memelihara komunikasi dan interaksi yang baik dengan masyarakat, bersifat kreatif, proaktif, dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda.

Mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat dewasa ini masih banyak yang tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik yang bermutu merupakan wujud akuntabilitas dari pemerintah selaku penyedia layanan publik. Pelayanan publik yang bermutu akan menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah. Posisi pegawai ASN sebagai aparatur memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aparatur bekerja untuk kesejahteraan dan kepuasan masyarakat, melalui pelayanan yang adil dan bermutu. Faktor-faktor yang bisa menjadi pendorong sekaligus menghambat upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu, antara lain: perubahan pola pikir (*mindset*) aparatur, pergeseran lain: perubahan pola pikir (*mindset*) aparatur, pergeseran (*corporate governance*).

Nilai-nilai dasar orientasi mutu dalam memberikan layanan prima minimal mencakup hal-hal berikut:

1. Mengedepankan komitmen terhadap kepuasan *customers/clients*;
2. Memberikan layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar *customers/clients* tetap setia;
3. Menghasilkan produk/jasa yang berkualitas tinggi: tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan;

4. Beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan *customers/clients* maupun perkembangan teknologi;
5. Menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan;
6. Melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain: pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan *benchmark*.

Nilai-nilai dasar sebagai indikator dalam menilai mutu pelayanan adalah :

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nyata terwujud ( <i>tangible</i> )      | 7. Komunikasi ( <i>communication</i> );   |
| 2. Keandalan ( <i>reability</i> )          | 8. Kepercayaan ( <i>credibility</i> );  |
| 3. Cepat tanggap ( <i>responsiveness</i> ) | 9. Pemahaman pelanggan ( <i>understanding the customer</i> ) (Lembaga Administrasi Negara, 2015). |
| 4. Kompetensi ( <i>competence</i> )        |   |
| 5. Kemudahan ( <i>access</i> );            |   |
| 6. Keramahan ( <i>courtesy</i> );          | 10. Keamanan ( <i>security</i> ).   |

#### **E. Anti Korupsi**

Korupsi merupakan produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak (Irfan, 2012). Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri/orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal yang dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006) jenis yaitu:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Kerugian keuangan negara   | 5. Perbuatan curang,                   |
| 2. Suap-menyuap               | 6. Enturan kepentingan dalam pengadaan |
| 3. Penggelapan dalam jabatan, | 7. Ratifikasi .                        |
| 4. Pemerasan,                 |  |

Anti korupsi adalah sikap dan perilaku yang tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, singkatnya ialah sikap menentang terhadap adanya korupsi. Korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Anti korupsi menurut saya adalah pikiran dan tindakan yang tidak mendukung adanya penyalahgunaan kepercayaan yang melanggar hukum yang dapat merugikan negara. Ada 3 (tiga) strategi dalam pemberantasan korupsi, yaitu: 1. perbaikan sistem, 2. edukasi, dan 3. represif. Untuk mendukung pemberantasan korupsi, KPK bersama para pakar telah mengidentifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi, dan dihasilkan sebanyak 9 (Sembilan) nilai anti korupsi yaitu:

1. Jujur
2. Mandiri
3. Peduli
4. Disiplin
5. Tanggung jawab
6. Keja keras
7. Sederhana
8. Berani
9. Adil

### **3.2 Kedudukan dan Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)**

#### **A. Manajemen ASN**

Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman.

➤ Pegawai ASN memiliki fungsi sebagai:

1. Pelaksana kebijakan publik;
2. Pelayan publik;
3. Perekat dan pemersatu bangsa.

➤ Tugas daripada pegawai ASN:

1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun peran pegawai ASN sebagai: perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut. ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah. ASN senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan golongan.

## **B. Whole of Government (WoG)**

*Whole of Government* atau disingkat WoG merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Pendekatan WoG di beberapa negara ini dipandang sebagai bagian dari respon terhadap ilusi paradigma *New Public Management* (NPM) yang banyak menekankan aspek efisiensi dan cenderung mendorong ego sektoral dibandingkan perspektif integrasi sektor. WoG merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang selama ini terbangun dalam model NPM. Terdapat beberapa cara pendekatan WoG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal, yaitu:

1. penguatan koordinasi antar lembaga;
2. membentuk lembaga koordinasi khusus;
3. membentuk gugus tugas; dan
4. koalisi sosial.

WoG menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap, perilaku, dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dalam fondasi kebangsaan yang lebih mendasar, yang mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan. Alasan WoG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah adalah:

1. adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WoG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan public;
2. adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan;

3. khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu naungan NKRI (Suwarno & Sejati, 2017).

### **C. Pelayanan Publik**

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu:

1. organisasi penyelenggara pelayanan public;
2. penerima layanan (pelanggan) yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan;
3. kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

9 prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah: partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan.

4 hal pokok yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia adalah:

1. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Dengan demikian menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya baik dilakukan sendiri (oleh birokrasi pemerintah) maupun bekerja sama dengan sektor swasta.
2. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga

negara. Oleh karena itu, sebagai seorang ASN harus paham bahwa warga negara adalah *agent* (tuan) dan ASN adalah *client* (pelayan). Konsekuensinya, ASN yang harus mengikuti kehendak masyarakat pengguna layanan, bukan sebaliknya.

3. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang.
4. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara (proteksi) (Purwanto dkk., 2017).

## **BAB IV**

### **RANCANGAN AKTUALISASI**

#### **4.1 Identifikasi Isu**

Isu merupakan suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Dalam mengidentifikasi isu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti kemampuan sumber daya, manusia, biaya, tenaga, teknologi, dan lain sebagainya.

Adapun beberapa isu yang diambil pada rancangan aktualisasi ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi pengambilan titik koordinat areal yang berpotensi rawan longsor di jalan Soekarno Hatta Kota Bontang

Seperti dalam penjelasan di bab sebelumnya bahwa jalan soekarno-hatta merupakan akses menuju gedung pemerintahan terpusat yang berada di kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan. Sehingga jalan tersebut merupakan jalan yang menjadi perhatian penting agar pemanfaatan jalan tetap selalu dalam kondisi kualitas yang baik untuk dilalui pengguna jalan. Terputusnya akses jalan ketika terjadi longsor akan berdampak besar terhadap kinerja ASN, sehingga pengendalian jalan perlu dilakukan agar penanganan dini dan pencegahan pada kerusakan jalan dapat teratasi. Salah satu cara pengendalian jalan terhadap longsor pada jalan adalah dengan melakukan identifikasi pada areal jalan yang berpotensi rawan terjadinya longsor.



*Gambar 2. Foto Dokumentasi Pekerjaan Longsor di Lapangan*

2. Perencanaan pembuatan patok STA di jalan Soekarno-Hatta Kota Bontang. Patok STA merupakan patok yang memberikan informasi dan digunakan untuk menentukan panjang sebuah jalan atau juga untuk menentukan jarak sebuah tempat ke tempat lainnya. Jika tanpa patok tersebut agak sulit untuk memberikan informasi posisi seseorang atau sesuatu ditempat tersebut.
3. Pembuatan *SafetyCone* dari Ecobriks yang berwawasan lingkungan. *SafetyCone* adalah perangkat pengaturan lalu lintas yang bersifat sementara berupa kerucut yang terbuat dari plastik atau karet. *safetycone* dicuri atau rusak ditabrak merupakan Kurangnya/tidak adanya *safetycone* pada pekerjaan proyek jalan sangat membahayakan pengguna jalan.

#### **4.2 Prioritas (Teknik Analisis)**

Untuk menentukan prioritas isu/masalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Analisis USG merupakan alat yang digunakan untuk menyusun urutan prioritas yang penting, serius, dan berkembang untuk diselesaikan. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Pengertian *urgency, seriousness, dan growth* dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **a. Urgency**

Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi.

##### **b. Seriousness**

Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan.

##### **c. Growth**

Seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan.

Cara menggunakan metode USG adalah dengan menentukan nilai tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan masalah pada masing-masing masalah pokok dengan memberikan skala nilai 1-5 (keterangan : 5 = sangat besar, 4 = besar, 3 = sedang, 2 = kecil, 1= sangat kecil). Berikut tabel analisis metode USG yang menjelaskan proses penentuan skala prioritas isu.

*Tabel 1. Proses Penentuan Skala Prioritas Isu Menggunakan Metode USG*

<b>No.</b>	<b>Uraian Isu</b>	<b>U</b>	<b>S</b>	<b>G</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>RANKING</b>
<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>	<b>f=(c+d+e)</b>	<b>(g)</b>
1.	Belum adanya Identifikasi pengambilan titik koordinat areal yang berpotensi rawan longsor dijalan Soekarno Hatta Kota Bontang	4	5	5	14	<b>1</b>
2.	Belum adanya patok STA di jalan Soekarno-Hatta Kota Bontang	4	4	4	11	<b>2</b>
3.	Pembuatan <i>SafetyCone</i> dari Ecobriks yang berwawasan lingkungan	3	3	4	10	<b>3</b>

### **4.3 Isu Terpilih**

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Kerusakan pada kondisi jalan bisa disebabkan beberapa hal salah satunya yaitu terjadinya longsor pada jalan. Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang memengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergerak material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang memengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lainnya

yang turut berpengaruh yaitu erosi, gempa bumi, gunung berapi dan getaran lalu lintas. Upaya pencegahan harus dilakukan sedini mungkin agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar.

Berdasarkan analisis isu di atas dengan metode USG, maka isu yang memerlukan perhatian dan peningkatan saat ini adalah **“Belum adanya Identifikasi Pengambilan Titik Koordinat Areal Yang Berpotensi Rawan Longsor Dijalan Soekarno Hatta Kota Bontang”**

Upaya Identifikasi pengambilan titik koordinat areal yang berpotensi rawan longsor dijalan soekarno-hatta kota Bontang merupakan salah satu bentuk **pelaksana kebijakan** dalam hal ini terhadap Peraturan Menteri PUPR nomor 04/PRT/M/2012 tentang Tata cara Pengawasan Jalan. Selain itu, pendekatan pada fungsi **pelayanan publik** terdapat pada upaya dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang sesuai kebutuhan untuk fasilitas transportasi masyarakat, khususnya di kota Bontang. Kemudian merupakan pendekatan fungsi **perekat dan pemersatu bangsa** Dengan adanya jalan penghubung ini memudahkan transportasi ke berbagai sudut kota Bontang, masyarakat dapat saling terhubung meskipun dari berbagai latar belakang.

#### **4.4 Uraian Kegiatan**

Nama Peserta	: Alfi Hary Nugroho, S.T.
NIP	: 19910517 201903 1 014
Unit Kerja	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Identifikasi Isu	: Belum adanya Identifikasi pengambilan titik koordinat areal yang berpotensi rawan longsor dijalan Soekarno Hatta Kota Bontang
Gagasan	: Identifikasi pengambilan titik koordinat areal yang berpotensi rawan longsor dijalan Soekarno Hatta Kota Bontang
Kegiatan	: 1. Membuat form isian survey identifikasi areal berpotensi rawan longsor 2. Melaksanakan identifikasi dan pengambilan titik koordinat areal yang berpotensi rawan longsor

dilapangan

3. Mengolah hasil data survey dan membuat formulir lembar kontrol areal yang berpotensi rawan longsor
4. Melakukan evaluasi kegiatan dan data survey areal yang berpotensi rawan longsor

## 4.5 Rancangan Aktualisasi

Tabel 2. Rancangan Aktualisasi

<b>UNIT KERJA</b>		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang		
<b>IDENTIFIKASI ISU</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya Identifikasi pengambilan titik koordinat areal yang berpotensi rawan longsor di jalan Soekarno Hatta Kota Bontang</li> <li>2. Belum adanya patok STA di jalan Soekarno-Hatta Kota Bontang</li> <li>3. Pembuatan <i>SafetyCone</i> dari Ecobriks yang berwawasan lingkungan</li> </ol>		
<b>ISU YANG DIANGKAT</b>		Belum adanya Identifikasi pengambilan titik koordinat areal yang berpotensi rawan longsor di jalan Soekarno Hatta Kota Bontang		
<b>SOLUSI PEMECAHAN ISU</b>		Penerapan Identifikasi pengambilan titik koordinat areal yang berpotensi rawan longsor di jalan Soekarno Hatta Kota Bontang		
<b>No.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>TAHAPAN KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>KETERKAITAN SUBSTANSI MASA PELATIHAN</b>
1.	Membuat form isian survey identifikasi areal berpotensi rawan longsor	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mencari referensi tentang longsor dan pengambilan titik koordinat</li> <li>b. Membuat form isian survey</li> <li>c. Mengkoordinasikan kegiatan kepada atasan</li> </ol>	<p>Formulir Isian survey</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Akuntabilitas:</b> Kumpulan referensi yang dicari dilakukan dengan <b>Relevan</b> sesuai dengan literatur yang ada dan dapat <b>dipertanggungjawabkan</b> kebenarannya</li> <li>- <b>Nasionalisme:</b> Mengkoordinasikan kegiatan kepada atasan <b>merupakan sikap menjunjung tinggi Musyawarah</b></li> <li>- <b>Etika Publik:</b> Bersikap dan bertutur kata yang <b>Sopan santun</b> saat mengkoordinasikan kegiatan kepada atasan</li> <li>- <b>Komitmen Mutu:</b> Formulir isian survey yang akan dibuat dapat digunakan secara <b>efektif dan efisien</b></li> </ul>

				- <b>Anti Korupsi:</b> Formulir isian survey yang dibuat mudah dipahami dan <b>transparan</b> bagi orang lain
2.	<b>Melaksanakan identifikasi dan pengambilan titik koordinat areal yang berpotensi rawan longsor dilapangan</b>	<p>a. Mempersiapkan bahan dan peralatan serta APD</p> <p>b. Mengidentifikasi areal yang berpotensi rawan longsor</p> <p>c. Pengambilan titik koordinat</p> <p>d. Mencatat hasil identifikasi ke form isian survey</p> <p>e. Mengkoordinasikan hasil kegiatan survey lapangan ke atasan</p>	Formulir isian survey yang telah diisi data lapangan	<p>- <b>Akuntabilitas:</b> Data yang diperoleh merupakan data survey yang <b>dapat dipertanggungjawabkan</b> dan <b>kesesuaian</b> kondisi dilapangan.</p> <p>- <b>Nasionalisme:</b> Kegiatan survey dilapangan ini merupakan <b>kepentingan bersama</b> dalam memelihara jalan dari terjadinya longsor</p> <p>- <b>Etika Publik:</b> Memberikan contoh <b>teladan</b> yang baik kepada masyarakat dengan menggunakan APD atau alat pelindung diri saat bekerja dilapangan</p> <p>- <b>Komitmen Mutu:</b> Data lapangan yang didapatkan diisikan dengan <b>Teliti</b> ke formulir isian survey</p> <p><b>Anti Korupsi:</b> Data lapangan yang di koordinasikan kepada atasan disampaikan dengan <b>Jujur dan Transparan</b></p>
3.	<b>Mengolah hasil data survey dan membuat formulir lembar kontrol areal yang berpotensi rawan longsor</b>	<p>a. Mengolah data hasil survey</p> <p>b. Membuat form lembar control areal yang berpotensi rawan longsor</p> <p>c. Mengkoordinasiikan data hasil survey dan form lembar kontrol ke atasan</p>	Form lembar control dan data hasil survey	<p>- <b>Akuntabilitas:</b> Pembuatan lembar kontrol dan data hasil survey yang diolah harus <b>Relevan</b> dan dapat <b>dipertanggungjawabkan</b> sesuai kondisi dilapangan</p> <p>- <b>Nasionalisme:</b> Mengkoordinasikan data hasil survey dan form lembar kontrol kepada atasan <b>merupakan sikap menjunjung tinggi Musyawarah</b></p> <p>- <b>Etika Publik:</b> Bersikap dan bertutur kata yang <b>Sopan santun</b> saat mengkoordinasikan data hasil survey dan Form lembar kontrol kepada atasan</p> <p>- <b>Komitmen Mutu:</b> Mengerjakan secara <b>efektif</b> dan <b>efisien</b> dalam mengolah data hasil survey</p>

				<p>dan membuat form lembar kontrol</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Anti Korupsi:</b> Data hasil survey dan form lembar kontrol yang dibuat dengan <b>Jujur dan Transparan</b></li> </ul>
4.	<p><b>Melakukan Evaluasi Kegiatan dan Data Survey Areal Yang Berpotensi Rawan Longsor</b></p>	<p>a. Mengumpulkan data hasil survey</p> <p>b. Membuat evaluasi terkait hasil survey</p> <p>c. Mengajukan hasil evaluasi kepada atasan untuk diketahui dan ditindaklanjuti terhadap hasil evaluasi</p>	<p>Laporan Hasil Evaluasi Survey</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Akuntabilitas:</b> kegiatan dan data hasil survey yang dievaluasi harus <b>jelas</b> dan dapat <b>dipertanggungjawabkan</b></li> <li>- <b>Nasionalisme:</b> Hasil evaluasi ini merupakan <b>kepentingan bersama</b> dalam memberikan informasi mengenai areal berpotensi rawan longsor di jalan Soekarno-Hatta</li> <li>- <b>Etika Publik: Kepedulian</b> untuk menindaklanjuti hasil evaluasi mengenai areal berpotensi rawan longsor di jalan Soekarno-Hatta</li> <li>- <b>Komitmen Mutu:</b> Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan tetap <b>Berorientasi pada mutu</b></li> <li>- <b>Anti Korupsi:</b> Hasil Evaluasi dibuat dengan <b>Jujur dan Transparan</b></li> </ul>

**KONTRIBUSI TERHADAP VISI-MISI ORGANISASI**

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Kerusakan pada kondisi jalan bisa disebabkan beberapa hal, salah satunya yaitu terjadinya longsor pada jalan. Selain sebagai penghubung, jalan juga merupakan aset daerah yang harus dipelihara, besarnya biaya perbaikan jalan terhadap kerusakan sangat memboroskan anggaran. Oleh karena itu identifikasi jalan adalah upaya pencegahan yang dilakukan sedini mungkin agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar.

**PENGUATAN TERHADAP NILAI ORGANISASI**

Berupaya melaksanakan kebijakan publik dengan berkomitmen dalam bekerja, bertanggung jawab, peduli, jujur, disiplin, serta mengutamakan kepentingan bersama. Mengedepankan sikap bermusyawarah dalam menghadapi suatu masalah, tetap menjaga sikap untuk sopan santun dan ramah, sehingga hasil yang ingin dicapai berorientasi pada mutu dengan efektif dan efisien serta relevan dan dapat dipertanggungjawabkan



## BAB V

### *Role Model*



Bapak Eko Yudhowo, ST. atau biasa dipanggil Pak Eko merupakan Kepala Seksi Pengendalian Bangunan dan Ruang Kota di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang. Beliau dilahirkan di Sei Gerong, 1 Januari 1975. Bapak Eko merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Suhardi dan Ibu Sri Muriyanti, beliau menempuh Pendidikan mulai dari TK hingga tamat SMA di Yayasan Vidatra Bontang.

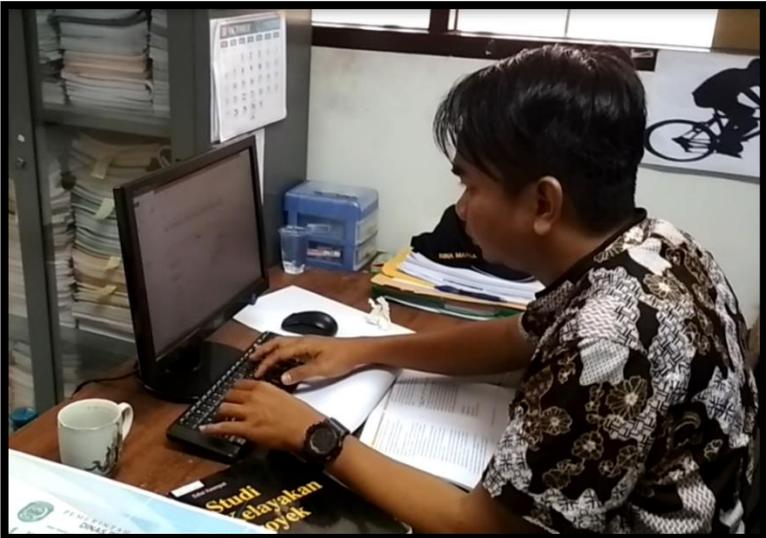
Bapak Eko dikaruniai 4 orang anak dari pernikahan beliau bersama Ibu Riesta Ariani. Sekarang Pak Eko beralamat tinggal di Jl. Timor no.111 Hop.5 kelurahan Gunung Telihan Kota Bontang.

Sejak tahun 2002 bulan, beliau mengabdikan sebagai PNS Kota Bontang hingga sekarang. Dengan latar pendidikan sarjana arsitektur beliau bertugas di dinas Pekerjaan Umum dibidang tata ruang hingga sekarang. Saya memilih Bapak Eko Yudhowo menjadi *Role Model* karena beliau berjiwa muda dan menerapkan gaya hidup sehat dengan sering berolahraga dan kami rutin berolahraga futsal setiap malam selasa. Dengan usia yang relatif masih muda sosok pak eko merupakan pemimpin muda di jaman generasi milenial ini. Dalam ritme bekerja Pak Eko memiliki sikap yang disiplin dan jujur. Selain itu beliau juga pribadi yang religius. Saya ingin mencontoh beliau dengan semangat mudanya dan sikap profesional dalam bekerja mengabdikan kepada masyarakat sebagai PNS.

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN AKTUALISASI**

**6.1 Laporan Kegiatan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar**

**a. Kegiatan 1**

Kegiatan	Membuat form isian survey identifikasi areal berpotensi rawan longsor
Tanggal	11 Oktober 2019 – 18 Oktober 2019
Daftar Lampiran	1. Formulir Isian survey (dapat dilihat pada Lampiran Kegiatan 1) 2. Dokumentasi tahapan kegiatan :
	 <p style="text-align: center;">Gambar 1. Mencari referensi tentang longsor dan pengambilan titik koordinat</p>  <p style="text-align: center;">Gambar 2. Membuat Form Isian Survey</p>



Gambar 4. Mengkoordinasikan kegiatan kepada atasan

### **1. Mencari referensi tentang longsor dan pengambilan titik koordinat**

Mencari referensi merupakan langkah awal sebelum melakukan kegiatan identifikasi. Dalam Mencari referensi kegiatan maka dapat memahami *scope* pekerjaan yang akan dilakukan. Mencari referensi dapat dilakukan beberapa cara salah satu nya melakukan diskusi dengan rekan kerja yang berpengalaman di lapangan untuk mendapat saran dan masukan (**Mencerminkan sila ke-4**) dan referensi yang dicari dilakukan dengan relevan sesuai dengan literatur yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (**Akuntabilitas**).

### **2. Membuat Form Isian Survey**

Kemudian setelah mencari referensi, tahapan kegiatan berikutnya adalah membuat form isian survey. Dalam melakukan tahapan ini Formulir isian survey yang dibuat dapat digunakan secara efektif dan efisien (**Komitmen Mutu**) serta dibuat mudah dipahami dan transparan bagi orang lain (**Anti Korupsi**). form isian survey (terlampir) yang digunakan dalam pengambilan data dilapangan merupakan Output dari tahap kegiatan ini.

### **3. Mengkoordinasikan kegiatan kepada atasan**

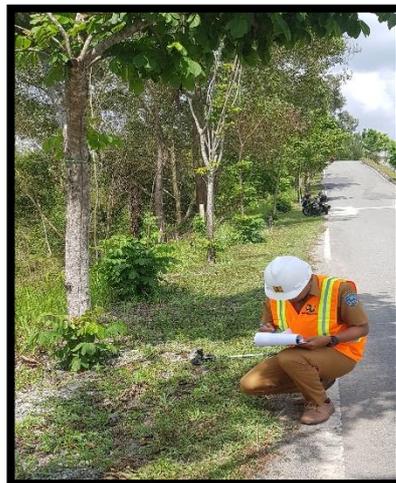
Formulir isian survey yang telah dibuat kemudian mengkoordinasikan kepada atasan dengan bersikap dan bertutur kata yang Sopan santun ketika menjelaskan form isian survey (**Etika Publik**).

## b. Kegiatan 2

Kegiatan	Melaksanakan identifikasi dan pengambilan titik koordinat areal yang berpotensi rawan longsor dilapangan
Tanggal	21 Oktober 2019 – 6 November 2019
Daftar Lampiran	1. Formulir isian survey yang telah diisi data lapangan dapat dilihat pada Lampiran Kegiatan 2) 2. Dokumentasi tahapan kegiatan :
	 <p>Gambar 1. Mempersiapkan bahan dan peralatan serta APD</p>  <p>Gambar 2. Mengidentifikasi areal yang berpotensi rawan longsor</p>



Gambar 3. Pengambilan titik koordinat



Gambar 4. Mencatat hasil identifikasi ke form isian survey



Gambar 5. Mengkoordinasikan hasil kegiatan survey lapangan ke atasan

### **1. Mempersiapkan bahan dan peralatan serta APD**

Tahapan kegiatan pertama pada kegiatan kedua ini adalah mempersiapkan bahan peralatan seperti alat tulis, kompas, *surveyor's wheel*/meteran roda dan sebagainya, serta yang paling penting adalah menggunakan APD atau alat pelindung diri, penggunaan APD ini adalah sebagai salah satu upaya dalam meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dilapangan. Dan masyarakat yang melihat pun dapat mencontoh teladan perilaku kerja yang taat penggunaan APD (**etika publik**)

### **2. Mengidentifikasi areal yang berpotensi rawan longsor**

Tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi areal yang berpotensi rawan longsor dilapangan. Tahapan kegiatan ini dilakukan berdasarkan penerapan referensi yang di dapatkan pada tahapan kegiatan pertama pada kegiatan ke-1. Dengan mengidentifikasi areal kondisi-kondisi lereng seperti sudut lereng,tinggi, lereng,panjang, tataguna lahan, vegetasi lereng dan lain-lain. Sebagaimana dibab sebelumnya dijelaskan bahwa jalan soekarno-hatta kota Bontang merupakan satu-satunya akses jalan menuju ke pusat pemerintahan kota bontang. Jadi Kegiatan survey dilapangan ini merupakan salah satu upaya kepentingan bersama dalam memelihara jalan dari terjadinya longsor (**nasionalisme**).

### **3. Pengambilan titik koordinat**

Setelah mengidentifikasi areal yang berpotensi rawan longsor, tahapan kegiatan berikutnya adalah pengambilan titik koordinat. Panjang jalan soekarno-hatta kota bontang adalah sekitar 10,9 kilometer dengan dua jalur yang dibatasi median jalan dan lebar jalan 7 meter untuk setiap jalurnya. Untuk memudahkan pembuatan peta dan pengamatan rutin lokasi pada periode selanjutnya dengan melakukan pengambilan titik koordinat. Alat yang digunakan dalam pengambilan titik koordinat adalah handphone yang telah terinstal aplikasi *software* MAPS.ME. Pada tahapan kegiatan ini Data yang diperoleh haruslah merupakan data survey yang dapat dipertanggungjawabkan dan kesesuaian kondisi dilapangan (**akuntabilitas**).

### **4. Mencatat hasil identifikasi ke form isian survey**

Setelah melaksanakan tahapan kegiatan kedua dan ketiga yaitu mencatat hasil identifikasi ke form isian survey. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan dilapangan yang sangat menguras tenaga dan pikiran oleh karena itu data lapangan yang didapatkan haruslah diisikan dengan teliti ke formulir isian survey (**Komitmen Mutu**).

### 5. Mengkoordinasikan hasil kegiatan survey lapangan ke atasan

Tahapan kegiatan terakhir dari kegiatan kedua ini, yaitu hasil data yang diperoleh dilapangan kembali di koordinasikan kepada atasan. Untuk mendapatkan koreksi berupa masukan saran dan kritik yang membangun dari atasan. Data lapangan yang di koordinasikan kepada atasan disampaikan dengan jujur dan transparan (**Anti Korupsi**).

### c. Kegiatan 3

Kegiatan	<b>Mengolah hasil data survey dan membuat formulir lembar kontrol areal yang berpotensi rawan longsor</b>
Tanggal	23 Oktober 2019 – 8 November 2019
Daftar Lampiran	1. Form lembar kontrol dan data hasil survey (dapat dilihat pada Lampiran Kegiatan 3) 2. Dokumentasi tahapan kegiatan :
	 Gambar 1. Mengolah data hasil survey
	 Gambar 2. Membuat form lembar control areal yang berpotensi rawan longsor



Gambar 3. Mengkoordinasi data hasil survey dan form lembar kontrol ke atasan

### **1. Mengolah data hasil survey**

Tahapan awal dari kegiatan 3 ini adalah mengolah data hasil survey yang di dapatkan dilapangan, pengolahan data hasil survey ini bertujuan untuk menghasilkan informasi lain dalam bentuk yang berguna untuk memudahkan dalam melakukan identifikasi ke depannya. Data hasil survey yang diolah harus relevan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kondisi dilapangan (**akuntabilitas**) serta dibuat dengan Jujur dan Transparan (**anti korupsi**)

### **2. Membuat form lembar kontrol areal yang berpotensi rawan longsor**

Selanjutnya adalah membuat form lembar kontrol, longsor merupakan pergerakan tanah yang sifatnya dinamis atau berubah-ubah yang disebabkan berbagai hal sebagaimana dijelaskan di bab awal. Oleh karena itu pengamatan identifikasi longsor dilakukan berkesinambungan secara rutin. Form lembar kontrol di buat secara efektif dan efisien (**komitmen mutu**)

### **3. Mengkoordinasi data hasil survey dan form lembar kontrol ke atasan**

Data hasil survey dan lembar kontrol yang dibuat kemudian dikoordinasikan kepada atasan, hal ini merupakan sikap menjunjung tinggi Musyawarah (**nasionalisme**) terhadap kegiatan sebelumnya yang telah dilakukan untuk mendapatkan koreksi, saran dan hasil yang lebih baik. Bersikap dan bertutur kata yang Sopan santun dalam mengkoordinasikan data hasil survey dan Form lembar kontrol kepada atasan (**etika publik**)

#### d. Kegiatan 4

Kegiatan	Melakukan Evaluasi Kegiatan dan Data Survey Areal Yang Berpotensi Rawan Longsor
Tanggal	11 November 2019 – 18 November 2019
Daftar Lampiran	1. Laporan Hasil Evaluasi Survey (dapat dilihat pada Lampiran Kegiatan 4) 2. Dokumentasi tahapan kegiatan :
	 <p>Gambar 1. Mengumpulkan data hasil survey</p>  <p>Gambar 2. Membuat evaluasi terkait hasil survey</p>



Gambar 3. Mengajukan hasil evaluasi kepada atasan untuk diketahui dan ditindaklanjuti terhadap hasil evaluasi

### **1. Mengumpulkan data hasil survey**

Dalam melakukan evaluasi kegiatan yang harus pertama dilakukan adalah mengumpulkan data hasil survey dengan lengkap dari awal, karena ketidaklengkapan dalam mengevaluasi maka hasil yang didapatkan tidaklah maksimal, data hasil survey yang dievaluasi harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (**akuntabilitas**)

### **2. Membuat evaluasi terkait hasil survey**

Setelah data terkumpul, tahapan kegiatan selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk mengetahui kekurangan agar ada perbaikan dalam kegiatan sebelumnya oleh karena itu dalam menindaklanjuti hasil evaluasi tetap berorientasi pada mutu (**komitmen mutu**) dan hasil evaluasi dibuat dengan Jujur dan Transparan (**anti korupsi**)

### **3. Mengajukan hasil evaluasi kepada atasan untuk diketahui dan ditindaklanjuti terhadap hasil evaluasi**

Kepedulian untuk menindaklanjuti hasil evaluasi mengenai areal berpotensi rawan longsor dijalan soekarno-hatta (**etika publik**) dan hasil evaluasi ini merupakan kepentingan bersama dalam memberikan informasi mengenai areal berpotensi rawan longsor dijalan soekarno-hatta (**nasionalisme**) sebagai Upaya pencegahan yang dilakukan sedini mungkin agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar.

## **BAB VII**

### **KENDALA DAN SOLUSI**

Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan aktualisasi antara lain :

1. Belum adanya acuan pedoman form identifikasi areal rawan longsor di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang di bidang binamarga sehingga tidak memiliki gambaran yang jelas dalam pembuatan form identifikasi
2. Atasan langsung yang dimutasi dan atasan langsung yang baru juga memiliki kesibukan dalam pelaksanaan konsultasi
3. Terbatasnya waktu yang diberikan dalam menyelesaikan aktualisasi dan sebagian waktu digunakan untuk pekerjaan pokok
4. Terbatasnya peralatan survey yang digunakan untuk identifikasi dilapangan
5. Kegiatan aktualisasi yang lebih banyak dilakukan dilapangan sehingga dapat menurunkan kesehatan tubuh

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu :

1. Mencari referensi seperti berdiskusi dengan rekan kerja dan atasan serta kontraktor dan konsultan yang berpengalaman dan ahli dibidangnya, mencari literatur dipergustakaan dan internet sehingga mendapatkan gambaran jelas dalam pembuatan form identifikasi.
2. Melaksanakan konsultasi dengan atasan langsung via handphone di saat yang tepat, selain itu mentor juga merupakan eks-Kepala Bidang Binamarga
3. Memanajemen waktu lebih baik sehingga aktualisasi dapat diselesaikan tepat waktu
4. Menghubungi teman yang bekerja di bagian survey untuk meminjam peralatan dengan akurasi yang cukup baik
5. Menjaga kesehatan tubuh agar stamina tetap fit seperti minum vitamin dan tidur yang cukup

## **BAB VIII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **8.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari pelaksanaan aktualisasi ini adalah :

1. Dari hasil identifikasi didapatkan 24 titik areal berpotensi rawan longsor jalan soekarno-hatta kota bontang yaitu 12 disisi kiri dan 12 disisi kanan
2. Terbuatnya form lembar kontrol untuk identifikasi areal yang berpotensi rawan longsor dijalan soekarno-hatta kota Bontang sebagai salah satu upaya dalam pencegahan dini terhadap longSORan agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar
3. Dari data hasil survey yang diolah terbuatlh peta berdasarkan titik koordinat yang didapatkan dilapangan areal yang berpotensi rawan longsor dijalan soekarno-hatta kota Bontang yaitu 12 titik areal disebalah kiri dan 12 titik areal disebalah kanan
4. Hasil evaluasi menunjukan terdapat titik areal yang berbahaya yaitu pada T12L, sehingga pada areal tersebut untuk segera ditindaklanjuti.

#### **8.2 Saran**

Saran untuk pelaksanaan aktualisasi ini adalah :

1. Mengembangkan form lembar identifikasi ini agar parameter yang tercantum ditambahkan lebih spesifik seperti penambahan pengujian tanah sehingga hasil identifikasi lebih akurat
2. Memiliki peralatan yang lengkap dan akurasi yang lebih baik
3. Mempelajari lebih lanjut mengenai hasil evaluasi
4. Berkoordinasi dengan dinas lain terkait dengan jalan

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pekerjaan umum. *Pedoman Konstruksi dan Bangunan Pd T-09-2005-B Tentang Rekayasa penanganan keruntuhan lereng pada tanah residual dan batuan*. Departemen Pekerjaan Umum
- Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Modul 2 Diklat Penanganan Longsor pada Struktur Jalan Tentang Survey Lereng dan Longsoran serta Manajemen Lereng*. Kementerian PUPR.
- Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Akuntabilitas*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Nasionalisme*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Etika Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Komitmen Mutu*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Anti Korupsi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Pelayanan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Manajemen Aparatur Sipil Negara* . Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Whole of Government*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Habitiasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05 Tahun 2012 *Tentang Tata Cara Pengawasan Jalan*